

ORANG LAUT TERSISIH DALAM PEMBANGUNAN KOTA BATAM

THE SEA PEOPLE ARE MARGINALIZED IN THE DEVELOPMENT OF BATAM CITY

Dedi Arman

Pusat Riset Kewilayahan- Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sasana Widya Sarwono (SWS) Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Email: dedi023@brin.go.id

Corresponding author: dedi023@brin.go.id

Dihantar: 20 Mei 2025/ Diterima: 1 ogos 2025/ Terbit: 31 Desember 2025

Abstrak

Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 1980-an hingga kini, menjadi salahsatu kota industri utama di Indonesia dan pusat perekonomian nasional. Pesatnya Pembangunan Batam berimbas buruk pada masyarakat adat yang ada di Batam, salahsatunya Orang Laut. Tulisan mengkaji Orang Laut tersisih dalam Pembangunan Kota Batam. Kajian menggunakan metode penelitian sejarah dan metode etnografi. Dari penelitian diketahui, Orang Laut di Kota Batam direlokasi atau 'dirumahkan' ke sejumlah pulau yang ada, seperti Pulau Bertam, Pulau Gara, Tanjung Undap dan lainnya. Kehidupan Orang Laut yang mayoritas bekerja sebagai nelayan semakin sulit karena wilayah pesisir Batam terus dikembangkan untuk pengembangan industri. Reklamasi kawasan pesisir mengakibatkan berimbas pada hasil tangkapan ikan. Kejadian memilukan terjadi pada Orang Laut Pulau Air Mas, Kelurahan Ngenang. Perempuan Orang Laut dari daerah mencari pekerjaan lain menjadi pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Telaga Punggur, Batam.

Kata Kunci: Orang Laut, Batam, tersisih, pembangunan

Pengenalan

Orang Laut adalah salah satu masyarakat adat di Indonesia yang tersebar di pesisir timur Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Ada banyak sebutan kelompok ini berupa Orang Laut, Suku Sampan, Orang Mantang, Orang Duano, Orang Akit, Orang Sekak, dan lain sebagainya. Orang Suku Laut merupakan kelompok penjaga laut yang sudah mendiami daerah perairan Kepulauan Riau. Minimnya literasi yang mumpuni mengenai asal usul Orang Suku Laut dalam perlindungan sejarah, wilayah adat, dan benda peninggalan membuat eksistensi mengenai Orang Suku Laut tidak muncul ke permukaan pada abad 20 ini. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim peneliti Yayasan Kajang tahun 2020, saat ini Orang Suku Laut di Kepulauan Riau tersebar di lima kabupaten dengan estimasi terdapat 12.800 jiwa dan 44 lokasi. (Ariando, 2021).

Eksistensi Orang Laut di Kepri makin hilang seiring dengan berkembangnya informasi teknologi serta pembangunan masyarakat yang kurang tepat sasaran saat ini. Hal ini dibuktikan oleh rekapan hasil penelitian yang dikumpulkan oleh Yayasan Kajang. Namun di sisi lain, penelitian-penelitian ini menunjukkan Orang Laut memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan keanekaragaman hayati, serta menjaga keseimbangan ekosistem alam, baik di darat maupun di laut melalui pengetahuan tradisional yang telah mereka wariskan secara turun-temurun. Saat ini Orang Laut di Kepri memiliki pola hidup menetap, semi menetap, dan beberapa diantara mereka masih bertempat tinggal di sampankajang yang berlayar dalam kelompok kecil seperti ditemukan di Kabupaten Lingga. Hal menarik lainnya adalah adanya perubahan sosial budaya dari transisi pemindahan Orang Suku Laut, yang semula memiliki pola hidup nomaden menjadi masyarakat lokal pesisir yang hidup menetap. (Chou, 2003).

Sejak tahun 1980-an, pemerintah membuat program pembangunan rumah untuk Orang Laut di Kepri, termasuk di Kota Batam. Mereka direlokasi (dirumahkan) ke pulau-pulau yang ada di sekitar Batam dan diberikan perumahan untuk mereka. Kebijakan ini telah dilakukan berupa koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mempermudah pendataan dan harapannya meningkatkan taraf hidup Orang Laut. Ironisnya, inisiatif ini telah membuat Orang Suku Laut kehilangan identitas mereka sebagai Orang Laut. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini, Orang Laut dipaksa untuk bertarung dengan kerasnya hidup sebagai masyarakat lokal yang berorientasi kepada keamanan ekonomi. Kebutuhan dan gaya hidup sebagai masyarakat lokal yang hidup di darat ini membuat Orang Laut dengan mudah tergilas menjadi kelompok marginal yang miskin, tidak hanya secara pendapatan namun juga secara intelektual dan kecakapan budaya. Saat ini kelompok Orang Laut di Kepulauan Riau yang sudah menetap merupakan generasi kedua atau ketiga yang sudah bertahan hidup di darat. (Ariando, 2021).

Sorotan kajian

Sejumlah tulisan telah membahas tentang Orang Laut di Kota Batam. Diantaranya, Atik Rahmawati (2014) yang menulis "Kehidupan Suku Laut di Batam" sebuah Fenomena Kebijakan Pembangunan di Pulau Bertam, Kota Batam. Pesatnya pembangunan di Batam membawa pengaruh terhadap kehidupan Orang Laut. Departemen Sosial RI tahun 1989 memindahkan Orang Laut ke Pulau Bertam. Dalam program ini Depsos melibatkan unsur masyarakat setempat dalam hal ini Organisasi Sosial Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam. Program pembinaan Orang Laut di Pulau Bertam memiliki kelemahan mendasar yaitu pelaksanaan program tidak mempertimbangkan pada analisis kebutuhan (need assessment) komunitas sasaran, disamping juga mengesampingkan aspek budaya, adat dan istiadat komunitas sasaran serta didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah ditunjukkan dengan tingkat buta huruf yang tinggi. (Rahmawati, 2014).

Tulisan lain adalah Khidir Marsanto Prawirosusanto (2015) berjudul "Orang Laut, Permukiman dan Kekerasan Infrastruktur". Pembangunan infrastruktur dalam program pemukiman suku-suku terasing oleh pemerintah Orde Baru memantik sederet persoalan sosial dan kultural dalam kehidupan Orang Laut sebagai komunitas pengembara laut. Dengan adanya program pemukiman, Orang Laut justru terjerumus ke dalam kondisi kemiskinan, ketergantungan, kerentanan, dan ketersingkirkan. Sejumlah konsekuensi negatif inilah yang disebut sebagai kekerasan

infrastruktur (infrastructural violence). Akar dari sejumlah konsekuensi negatif tersebut terletak pada kekeliruan pemahaman pemerintah mengenai kebudayaan masyarakat berbasis laut yang amat bias dengan perspektif masyarakat berbasis darat. Kebijakan yang dilahirkan untuk menangani masalah-masalah masyarakat kelautan pun pada akhirnya meleset. (Prawirosusanto, 2015).

Ada juga tulisan Novita Mandasari Hutagaol (2018) berjudul Strategi Adaptasi Orang Laut di Batam. Pembangunan di tahun 1970-an di Batam mengakibatkan Orang Laut direlokasi ke darat oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Pada akhirnya Orang Laut mengikuti peraturan pemerintah untuk tinggal dan menetap di darat dan melakukan aktivitas sosial seperti masyarakat pada umumnya. Terdapat beberapa bentuk strategi adaptasi yang dijalankan, yakni tetap melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan membuat modifikasi alat tangkap dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tinggal di rumah apung. (Hutagaol, 2018).

Dari permasalahan ini, tulisan ini mengkaji Orang Laut Tersisih dalam Pembangunan Kota Batam. Pembangunan Kota Batam makin pesat secara infrastruktur, namun berdampak negatif pada kehidupan komunitas atau masyarakat adat, yakni Orang Laut. Bukti kongritnya adalah adanya temuan Orang Laut beralih mata pencaharian menjadi pemulung.

Metod Kajian

Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Ada lima tahapan dalam penelitian sejarah, yakni: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi (analisis sintesis) dan penulisan (Kuntowijoyo, 2014). Metode penelitian etnografi juga dipakai dalam menjelaskan kondisi rill Orang Laut yang saat ini di Kota Batam. Etnografi sebagai model penelitian sosial bisa dikatakan sebagai panorama studi lapangan yang cukup distingtif, di mana seorang etnografer akan terlibat langsung didalamnya dalam kurun waktu yang lama. Hal itu bertujuan untuk memudahkan pengamatan akan fenomena sosial yang terjadi. Secara lebih jauh lagi akan memudahkan dalam melakukan interpretasi data yang didapat. (Kamarusdiana, 2019).

Pengumpulan sumber dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2014). Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Kepulauan Riau dan perpustakaan Muhammad Yusuf Al Ahmadi di Tanjungpinang.

Hasil Dapatan dan Perbincangan

(1) Sejarah Orang Laut Kepri

Di Provinsi Kepulauan Riau, ada tiga kelompok (komunitas) masyarakat ada, yakni Orang Laut, Orang Darat dan Orang Akit. Orang Darat mendiami Pulau Rempang di Kota Batam, sementara Orang Akit tinggal di Teluk Setimbul, Kabupaten Karimun. Sementara, komunitas adat terbesar di Kepri adalah Orang Laut. Banyak penamaan untuk komunitas adat ini, paling familiar adalah Orang Laut. Ada juga yang

menyebut Orang Mantang, Orang Sampan, Orang Barok, Orang Selat. Orang asing menyebut sea nomads atau gipsi. (Arman, 2019).

Secara fisik, Orang Laut memiliki ciri-ciri fenotip berupa yang raut wajah yang agak keras dan warna kulit agak gelap. Nenek moyang Orang Laut ini diperkirakan adalah bangsa Proto-Melayu (Melayu tua) yang bermigrasi dari Vietnam dan Kamboja sebelum abad ke-10 Masehi. Ada yang memperkirakan Orang Laut telah ada sebelum masa Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 Masehi. Orang Laut yang tergolong ras Austronesia ini berasal dari daerah Sambas di Kalimantan yang kemudian berdiaspora ke wilayah pantai timur Sumatera mendiami daerah rawa-rawa di pesisir pantai. Selain bentuk fisik, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Orang Laut yang berbeda dengan bahasa Melayu semakin menguatkan asumsi bahwa etnis ini berbeda dengan etnis Melayu masa kini. (Azhari, 2019).

Jumlah Orang Laut di Kepri lumayan besar. Data Yayasan Kajang (2020), diprediksi jumlah Orang Laut mencapai 12.800 jiwa yang mendiami 44 titik (perkampungan) di lima kabupaten/kota di Kepri. Data riilnya bisa jadi jauh lebih besar dan selama ini permasalahan yang ada adalah lembaga seperti dinas sosial, badan pusat statistik (BPS) dan instansi lainnya tidak memiliki data yang akurat tentang Orang Laut ini. Di Kota Batam, Orang Laut mendiami Pulau Caros (Kelurahan Karas), Tanjung Undap (Kelurahan Tembesi), Pulau Nipah (Kelurahan Galang Baru), Pulau Nanga (Galang Baru), Pulau Bertam (Bulang). Orang Laut juga ada di Pulau Lingka (Bulang), Pulau Gara (Bulang) dan Pulau Air Mas (Ngenang). Orang Laut di Kepri kini memiliki pola hidup menetap, semi menetap, dan beberapa diantara mereka masih bertempat tinggal di sampan kajang yang berlayar dalam kelompok kecil. Hal menarik lainnya adalah adanya perubahan sosial budaya dari transisi pemindahan Orang Laut, yang semula memiliki pola hidup nomaden menjadi masyarakat lokal pesisir yang hidup menetap. Perubahan sosial ini lebih banyak diasosiasikan dengan degradasi kearifan lokal dan kepercayaan adat. (Ariando, 2021).

Saat ini status Orang Laut Kepri dianggap sebagai masyarakat adat. Sebelumnya mereka dikelompokkan dalam komunitas adat terpencil (KAT). Orang Laut pada masa lampau menjadi aktor penting dalam kegemilangan Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, Kesultanan Johor hingga Kesultanan Riau Lingga. Banyak sumber sejarah menunjukkan peran penting Orang Laut sebagai penguasa maritim (lautan) dalam mempertahankan hegemoni sebuah kesultanan. Termasuk diantaranya Sultan Johor Riau Lingga Pahang, Mahmud Riayat Syah yang kekuasaannya ditopang Orang Laut dalam menghadapi perang melawan Belanda.

(2) Tersisih Dampak Pembangunan

Perkembangan Batam sebagai daerah pusat investasi di kawasan Indonesia bagian barat, berdampak pada semakin tersisihnya komunitas adat yang sudah mendiami daerah ini ratusan tahun. Orang Laut yang mendiami pulau-pulau sekitar Pulau Batam, semakin terpinggirkan. Mereka tidak terbiasa bekerja di darat, sementara kehidupan sebagai nelayan semakin lama tidak lagi menjanjikan. Sejak tahun 1973 Batam sebagai wilayah strategis daerah perbatasan negara tumbuh menjadi daerah Industri, perdagangan, galangan kapal, dan pariwisata yang mempunyai otoritas pengembangan wilayah. Pesatnya pembangunan di Batam tentu saja membawa pengaruh terhadap kehidupan Orang Laut. Studi Prawirosusanto menilai ada

kekerasan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan 'mendaratkan' Orang Laut yang awalnya hidup nomaden di Perairan Batam. (Prawirosusanto, 2015).

Dalam kasus Batam, pemerintah membangun area khusus industri dan perdagangan bebas di Batam sejak tahun 1970-an awal. Kebijakan Pembangunan dalam menyulap wajah Batam menjadi daerah industri yang modern berimbas pada memindahkan Orang Laut ke pulau-pulau sekitar Pulau Batam, seperti Pulau Bertam. Pemerintah secara khusus mencanangkan program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT) di Batam dan sekitarnya tahun 1980-an. Melalui PKMT dan dalih pembangunan nasional, pemerintah berupaya mengubah pola hidup Orang Laut dengan jalan mendaratkan mereka di sejumlah pulau yang telah disiapkan infrastrukturnya.

Dengan adanya program pemukiman, Orang Laut justru terjerumus ke dalam kondisi kemiskinan, ketergantungan, kerentanan, dan ketersingkirkan. Sejumlah konsekuensi negatif inilah yang disebut sebagai kekerasan infrastruktur (infrastructural violence). Akar dari sejumlah konsekuensi negatif tersebut terletak pada kekeliruan pemahaman pemerintah mengenai kebudayaan masyarakat berbasis laut yang amat bias dengan perspektif masyarakat berbasis darat. Kebijakan yang dilahirkan untuk menangani masalah-masalah masyarakat kelautan pun pada akhirnya meleset.

Kehidupan Orang Laut mulai berubah seiring Pembangunan. Mereka tidak lagi hidup mengembara dengan sampan di lautan bebas, dan tidak pula melakukan aktivitas ekonomi secara subsisten. Mereka terus hidup dalam paradoks; hendak menjadi manusia modern atau bertahan dalam tradisi moyang mereka dengan segala konsekuensinya. Fakta ini tidak datang begitu saja, melainkan konsekuensi dari proses sosial politik dan sejarah yang panjang, yang membawa (atau memaksa) mereka berubah dari pola hidup tertentu ke pola hidup lain. Perubahan inilah yang pada gilirannya melahirkan kesadaran baru dalam komunitas mereka, yakni kesadaran Orang Laut yang mendarat. Orang Laut penerima uluran tangan negara itu justru terjebak dalam kemiskinan, ketergantungan, dan keterbelakangan baru yang jauh dari angan-angan pemerintah ihwal kondisi kehidupan layak dan mandiri pascapemukiman. Kehidupan sehari-hari yang layak menurut pemerintah tak lain adalah kehidupan modern dengan ketersediaan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di sekitar mereka.

Gambar 1: Rumah Orang Laut di Pulau Air Mas, Ngenang (Batam)



Sumber : Mongabay.id, 2024.

Sebagaimana yang pernah dialami oleh Orde Baru, pembangunan infrastruktur belum berpihak pada budaya maritim, terutama komunitas lokal. Proyek besar justru melahirkan manusia Indonesia yang dependen. Sedari awal, negara membalikkan konstruksi moral dan kultural mereka dengan menjadikan mereka sebagai kaum miskin, terbelakang, dan seterusnya. Padahal, fakta historis dan etnografis menunjuk kan sebaliknya. Mereka memiliki sistem sosial mendasar yang kuat dalam mendukung keberlangsungan hidup mereka sebagai suku bangsa pengembara laut (pra-pemukiman). (Prawirosusanto, 2015).

Selain itu, penting dicatat bahwa pembangunan maritim yang pernah dilakukan sangat bias pemikiran darat. Idealnya, Konsep pembangunan yang tepat sasaran harusnya mempertimbangan kebutuhan dan kesiapan masyarakatnya dalam mengadopsi program pembangunan tersebut. Hal ini kurang terlihat dalam program pembangunan yang bersinggungan dengan Orang Suku Laut di Kepulauan Riau. Banyak program pembangunan desa dan daerah yang tidak digunakan secara utuh oleh Orang Laut seperti bantuan panel surya, alat tangkap jaring, serta inisiasi pembuatan rumah yang menetap di satu pulau atau kawasan pesisir. Beberapa penelitian mengenai Orang Suku Laut menemukan bahwa program ini membuat pola hubungan ketergantungan dan pola pikir yang tidak mandiri dari Orang Laut. (Ariando, 2019).

Studi Rahmawati (2014), program merumahkan Orang Laut di pulau-pulau sekitar Batam, seperti Pulau Bertam memiliki sejumlah kelemahan. Program tidak mempertimbangkan pada analisis kebutuhan komunitas sasaran, disamping juga mengesampingkan aspek budaya, adat dan istiadat komunitas sasaran serta didukung dengan kualitas sumber daya manusia. Orang Laut di Pulau Bertam terjebak pada kehidupan yang terjebak pada tokenisme atau kehidupan mereka sangat tergantung pada toke yang ada di pulau tersebut. Orang Laut terjebak pada toke yang memberikan utang. Orang Laut yang terjebak pada kemiskinan. Hasil melaut tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Rahmawati, 2014).

Pembangunan Batam berdampak pada kawasan pesisir yang berimbas pada kehidupan Orang Laut. Reklamasi dikawasan yang berdekatan dengan perkampungan Orang Laut. Seperti kawasan industri di Tanjung Uncang berdampak pada Orang Laut di Tanjung Undap. Reklamasi di kawasan Punggur sekitarnya berdampak pada Orang Laut di Air Mas sekitarnya. Tahun 2024, Rencana pengembangan industri Rempang Eco City akan berdampak pada Orang Laut yang ada di Rempang-Galang. Di Rempang akan dibangun pabrik kaca yang membutuhkan pasir kuarsa. Selain pabrik kaca juga dikembangkan pusat pariwisata. Belum lagi rencana Pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang melewati Tanjungsauh diyakini akan berdampak pada Orang Laut di Kampung Air Mas.

Nasib Orang Laut di Kepri, termasuk Batam cukup rumit. Pemerintah menganggap, dengan merumahkan suku laut, mereka akan memiliki kelangsungan hidup yang lebih baik. Upaya pemerintah itu dilakukan tanpa kajian yang memadai. Ketika orang laut mulai menetap, hak-hak mereka banyak yang tidak terpenuhi. Bentuk kepedulian terhadap suku laut tak cukup hanya memberikan tempat tinggal. Pemerintah idealnya harus mengakui keberadaan Orang Laut sebagai masyarakat adat. Secara hukum, Orang Laut semestinya termasuk dalam masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional. Sayangnya, karena makna wilayah dan teritori adat dalam sejumlah peraturan masih berbasis darat, mereka tidak bisa diakui sebagai

masyarakat hukum adat. Sementara, Orang Laut juga tak dianggap memenuhi kriteria masyarakat tradisional karena ruang hidup masyarakat tersebut dibatasi sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. (Ariando, 2021).

(3) Orang Laut jadi Pemulung

Berita surat kabar Kompas, 9 Desember 2023 tentang Perempuan Orang Laut dari Kampung Air Mas, Kelurahan Ngenang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menjadi pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Telagapunggur, Batam mengagetkan peneliti dan aktivitas yang concern pada kehidupan Orang Laut di Kepulauan Riau. Peristiwa yang terasa begitu memilukan dan mencengangkan. Orang Laut yang merupakan penduduk asli Kepulauan Riau dan identik sebagai penguasa lautan, hidupnya jadi makin tersisih. (Wiyoga, 2023).

Gambar.2. Perempuan Orang Laut dari Pulau Air Mas menjadi pemulung di TPA Telagapunggur, Batam



Sumber: Mongabay.co.id, 19 Januari 2024

Aktivitas perempuan Orang Laut dari Kampung Air Mas menjadi pemulung di TPA Telagapunggur sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hasil memulung tidak hanya mengambil barang bekas. Makanan dan minuman yang dianggap masih layak diambil untuk dikonsumsi. Perempuan Orang Laut makin ramai jadi pemulung saat angin utara melanda perairan Kepulauan Riau. Mereka tidak bisa melaut sehingga terpaksa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil memulung. Orang Laut untuk menjadi pemulung butuh modal. Dari Kampung Air Mas, perempuan suku laut ini datang ke TPA Telagapunggur dengan biaya Rp40 ribu sekali berangkat. Masing-masing, Rp20 ribu untuk sewa naik kapal pompong pulang pergi (PP) dari Air Mas ke Pulau Batam, dan Rp20 ribu lagi untuk ongkos naik truk dari pelabuhan Punggur Dalam ke TPA Telagapunggur.

Pilihan menjadi pemulung karena hasil sebagai nelayan tidak lagi mencukupi. Berkurangnya hasil tangkapan ikan disebabkan karena sejumlah faktor, seperti faktor cuaca, perubahan iklim dan juga pesatnya Pembangunan di wilayah pesisir Batam.

Reklamasi secara masif dilakukan dalam beberapa tahun terakhir di pesisir Batam. Termasuk diantaranya di pesisir Telagapunggur, Tanjungundap. Kawasan ini ramai untuk industri perkapalan. Pembangunan di pesisir membuat air laut keruh. Karang-karang yang menjadi rumah ikan juga banyak yang rusak karena adanya reklamasi. Nelayan harus pergi jauh untuk mendapatkan ikan.

Mirisnya kehidupan Orang Laut di Kampung Air Mas, Batam mirip kasus yang menimpa Orang Bajau (Bajo) di Provinsi Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Orang Bajau di daerah Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) masuk dalam deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Mereka ada yang jadi pemulung dan pengemis. Kehidupan sebagai nelayan dianggap tidak lagi menjanjikan. Dalam keseharian mereka juga terjebak dalam lingkaran kemiskinan. (Kuraiza Usman, 2016)

Kesimpulan

Pembangunan idealnya mensejahterakan masyarakat. Pengembangan Batam sebagai kota industri membutuhkan areal lahan yang makin besar. Reklamasi makin masif dilakukan disepanjang pesisir yang ada di Batam. Kebijakan reklamasi berdampak buruk pada kehidupan Orang Laut yang ada di Batam. Orang Laut tinggal di pulau-pulau yang ada di sekitar Pulau Batam dan di pesisir Batam. Adanya reklamasi berdampak pada kehidupan masyarakat sebagai nelayan. Hasil tangkapan ikan menjadi turun. Daerah tangkapan ikan berubah menjadi daerah industri galangan kapal.

Orang Laut yang ada di Batam sejak tahun 1980-an, dipindahkan ke sejumlah pulau, seperti Pulau Bertam, Gara, Teluk Nipah, Caros dan ada juga perkampungan Orang Laut yang ada di pesisir Pulau Batam, seperti di Tanjung Undap. Rencana pengembangan wilayah, seperti Pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang diyakini akan berdampak pada kehidupan Orang Laut yang tinggal di sekitar kawasan ini. Demikian juga rencana pemerintah yang akan membangun Jembatan Batam-Bintan juga akan berpengaruh pada kehidupan Orang Laut yang ada di Pulau Air Mas, Kubung dan sekitarnya karena berada dalam kawasan yang akan dibangun.

Pemerintah diharapkan memberi perhatian pada kondisi masyarakat adat, khususnya Orang Laut di Kota Batam. Alangkah memilukan kalau Orang Laut yang merupakan penduduk asli Kota Batam tersisih dalam Pembangunan di kampung halamannya. Apalagi dalam kasus kekinian, mereka ada yang bekerja sebagai pemulung. Tragedi kemanusiaan, Orang Laut yang identik sebagai penguasa lautan, berubah menjadi hidup ketergantungan pada orang lain. Meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat laut berubah menjadi orang darat dan terbelit dalam kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Ariando, W. (2019). *Traditional Ecological Knowledge of Indigenous Peoples on Climate Change Adaptation: A Case Study of Sea Nomads "Orang Suku Laut", Lingga Regency, Riau Islands Province, Indonesia*. Chulalongkorn University.
- Ariando, W. (2021). *Orang Suku Laut Kepulauan Riau dalam Realita Pembangunan dan Kebijakan Daerah*. Orang Suku Laut Kepulauan Riau dalam Realita Pembangunan dan Kebijakan Daerah - Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan

Riau (kemdikbud.go.id)

- Arman, D. (2019). *Orang Laut dan Potret Kerukunan Beragama di Kepri*. CV Pustaka Media Guru.
- Azhari, I. (2019). Dekonstruksi Pembelajaran Sejarah Lokal di Kepulauan Riau. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(2), 152–163.
- Chou, C. (2003). *Indonesian Sea Nomads Money, Magic and Fear of the Orang Suku Laut*. Routledge.
- Hutagaol, N. M. (2018). Strategi Adaptasi Orang Laut di Batam. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1).
- Kamarusdiana. (2019). Studi Etnografi Dalam Kerangka Masyarakat Dan Budaya. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6(2), 113–128.
- Kuntowijoyo. (2014). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kuraiza Usman, R. D. B. (2016). Persistence of Poverty among the Badjaos of Bongao, Tawi-Tawi, ARMM, Philippines. *The Journal of Public Affairs and Development*, 3(1), 151–185.
- Prawirosusanto, K. M. (2015). Orang Laut, Permukiman dan Kekerasan Infrastruktur. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 41(2).
<https://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/viewFile/252/118>
- Rahmawati, A. (2014). Kehidupan Suku Laut di Batam: Sebuah Fenomena Kebijakan Pembangunan di Pulau Bertam Kota Batam. *Share Social Work Journal*, 4 No 1.
- Wiyoga, P. (2023). Perempuan Suku Laut, Nelayan Ulung yang Tersisih Jadi Pemulung. *Kompas.Id*.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/08/perempuan-suku-laut-nelayan-ulung-yang-tersisih-jadi-pemulung>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.